



TANGGAPAN UNTUK PROFIL PEKERJAAN YANG LAYAK INDONESIA

**Ir. Djuharsa M.D, MM
KEPALA BADAN LITBANG DAN INFOMASI**



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

AGENDA



I. PROFIL PEKERJAAN LAYAK INDONESIA

**II. PERBANDINGAN RTKN DAN PROFIL
DW INDONESIA**

III. STRATEGI DAN UPAYA KE DEPAN



1. PROFIL PEKERJAAN LAYAK INDONESIA



Pencapaian yang perlu perhatian :



— Kesempatan kerja

- **Masih berkembangnya pekerjaan informal, sektor pertanian dan sektor jasa**
- **Kondisi pasar kerja dualistik dan otonomi daerah**

— Pekerjaan Anak dan Paksa

- **Program Penarikan anak dari dunia kerja mengalami hambatan dikarenakan kurangnya akses pendidikan bagi anak dari dunia kerja.**

— Stabilitas dan keamanan kerja

- **Dalam periode pemantauan sedang berkembang kegiatan pembangunan infrastruktur yang sifatnya sementara.**
- **Berkembangnya sistem outsourcing yang kurang terkontrol.**



2. PERBANDINGAN RTKN DAN PROFIL DW INDONESIA



Laporan ILO memberikan penilaian yang baik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah pada jalur yang tepat, namun terdapat kriteria yang perlu diperhatikan :

	RTKN		MONEV ILO	
	2008	2009	2008	2009
Rasio KK Thd Populasi				
L	79,10	77,58	77,1	77,4
P	45,58	45,99	46,1	46,7
L+P	62,29	61,81	61,5	61,9
Tingkat Penganggur Terbuka				
L	7,71	8,48	8,4	7,9
P	9,07	7,86	9,7	8,5
L+P	8,21	8,25	8,4	7,9

- Pencapaian kesempatan kerja lebih baik dibandingkan dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional tahun 2008 dan 2009, demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.
- Rasio kesempatan kerja terhadap populasi untuk laki-laki dan perempuan memang cukup senjang karena adanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki dan perempuan yang juga senjang.





3. STRATEGI DAN UPAYA KE DEPAN





I. KEBIJAKAN NAKERTRANS BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL



A. DASAR KEBIJAKAN NAKERTRANS



- 1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**
- 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**
- 3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025**
- 4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014**
- 5. Permenakertrans No. PER.03/MEN/I/2010 tentang RENSTRA Kemenakertrans 2010-2014**



B. PRIORITAS NASIONAL 2010-2014

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014

- 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- 2 Pendidikan
- 3 Kesehatan
- 4 Penanggulangan Kemiskinan
- 5 Ketahanan Pangan
- 6 Infrastruktur
- 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- 8 Energi
- 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
- 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
- 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 13 Bidang Perekonomian
- 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

PRIORITAS BIDANG

PRIORITAS WILAYAH



C. EMPAT PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENAKERTRANS DALAM RPJMN 2010-2014



1. PRIORITAS NASIONAL KE -4: PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Kebijakan Kemenakertrans dalam menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui :

- a. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja;**
- b. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.**

2. PRIORITAS NASIONAL KE -7: PROGRAM AKSI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA.

Kebijakan Kemenakertrans dalam mendukung iklim investasi dan iklim usaha melalui :

- a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan;**
- b. Sinkronisasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / Peraturan Daerah;**
- c. Penguatan Lembaga Hubungan Industrial.**



Lanjutan



3. PRIORITAS NASIONAL KE-10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK.

Kebijakan Kemenakertrans dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik melalui :

- a. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- b. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

4. PRIORITAS NASIONAL LAINNYA (BIDANG PEREKONOMIAN)

Kebijakan Kemenakertrans dalam peningkatan perekonomian melalui :

- a. Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan;
- b. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.





D. PRIORITAS BIDANG : EKONOMI & WILAYAH DAN TATA RUANG

1. PRIORITAS BIDANG EKONOMI:

Fokus prioritas ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan melalui :

- a. Peningkatan Fasilitas dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja;**
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.**





2. PRIORITAS BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG:

Fokus prioritas ketransmigrasian diarahkan untuk mendukung :

- a. **Pembangunan Perdesaan**, melalui :
 - 1) Pembangunan kawasan transmigrasi
 - 2) Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
- b. **Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**, melalui Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

STRATEGI KEMENAKERTRANS



Untuk mencapai Sasaran Prioritas Nasional tersebut, ditetapkan strategi pembangunan yang mengacu pada ***Triple Plus Track Strategy*** yaitu strategi pembangunan:

- 1.Pro-poor;***
- 2.Pro-growth;***
- 3.Pro-job; plus***
- 4.Pro-environment.***



PROGRAM POKOK KEMENAKERTRANS YANG TERKAIT DENGAN *TRIPLE PLUS TRACK DEVELOPMENT STRATEGY*

NO	NAMA PROGRAM	<i>Pro Poor</i>	<i>Pro Growth</i>	<i>Pro Job</i>	<i>Pro Environment</i>
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	✓	✓	✓	✓
2	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	✓	✓	✓	✓
3	Pengembangan Hubungan Industrial Dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓
4	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	✓	✓	✓	✓
5	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓
6	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	✓	✓	✓	✓



Cerima Kasih



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA



Per Agustus 2011

**PENDUDUK
USIA KERJA
[≥ 15 Th]
171,75 juta**

**PENDUDUK
(237,24 juta)**

**ANGKATAN KERJA =
117,37 jt [68,34%]**

< SD : 56,18 jt [47,87%]
SMP : 22,60 jt [19,26%]
SMA : 19,15 jt [16,32%]
SMK : 9,89 jt [8,43%]
Dip. I/II/III : 3,41 jt [2,91%]
Universitas: 6,14 jt [5,23%]

**Bukan Angkatan
Kerja = 54,38 jt
[31,66%]**

**BEKERJA =
109,67 jt [93,44%]**

Pertanian : 39,33 jt [35,86%]
Industri : 14,54 jt [13,26%]
Konstruksi : 6,34 jt [5,78%]
Perdagangan: 23,40 jt [21,34%]
Transportasi: 5,08 jt [4,63%]
Pergudangan,
Dan Komunikasi
Keuangan : 2,63 jt [2,40%]
Jasa : 16,65 jt [15,18%]
Kemasyarakatan
Lainnya : 1,70 jt [1,45%]

**BEKERJA
> 35 Jam
75,08 jt
[68,46%]**

**BEKERJA
< 35 Jam
34,59 jt
[31,54%]**

**PENGANGGUR TERBUKA =
7,70 jt [6,56%]**

< SD : 2,00 jt [25,97%]
SMP : 1,90 jt [24,68%]
SMA : 2,04 jt [26,49%]
SMK : 1,03 jt [13,38%]
Dip. I/II/III : 0,24 jt [3,12%]
Universitas: 0,49 jt [6,36%]

SUMBER : BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI



II. SASARAN STRATEGIS BIDANG NAKERTRANS



SASARAN STRATEGIS

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Tahun 2010-2014



1. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebanyak **700.000 orang**.
2. Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja (bursa kerja) di **551 Kab/Kota**, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak **8.000.000 orang**.
3. Terbentuknya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di **20.000 Perusahaan** serta LKS Tripartit di **33 Provinsi** dan **400 Kab/ Kota**.
4. Terselenggaranya pengawasan bagi **300.000 Perusahaan** yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).



Lanjutan



5. Terbangunnya **10 Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)** dan **25 Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)** baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan **44.233 keluarga transmigran**.
6. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi pada **478 permukiman transmigrasi (86.200 keluarga)** dan berkembangnya **18 kawasan transmigrasi** sebagai embrio pusat pertumbuhan baru (**KOTA TERPADU MANDIRI/KTM**).
7. Terciptanya tata kelola organisasi yang **efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN** serta meningkatnya **pemanfaatan hasil penelitian dan informasi** sebagai acuan perumusan kebijakan.

